

Eksistensi Partai Politik Islam Menurut Perspektif Aktivistis Organisasi Mahasiswa Islam Di Universitas Baturaja

Alip Susilowati Utama¹⁾, Herwin Sagita Bela²⁾, Ikgang Putra Anggara³⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

Email : alipsusilo93@gmail.com¹⁾ herwinsb@gmail.com²⁾ ikang.putra91@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research based on the background that political parties in general and Islamic parties in particular are experiencing serious problems, namely the contradiction between the role and function idealism of the realities of everyday political party life witnessed by the public. Political parties receive a negative stigma, for example parties are considered corrupt, feudal and do not think about the fate of the little people. Islamic parties, which have been the object of research studies in several general election competitions (elections), have not been able to win or win the majority of votes despite having cultural and even ideological closeness to Muslims in Indonesia. The method used in this research is qualitative with a descriptive analytical approach. The results show that Islamic parties are still in doubt about their commitment to carrying out their responsibilities and in general they have not attracted or been trusted by some activists of Islamic student organizations, others still provide opportunities and trust in the hope that Islamic parties can improve the negative image attached to their institutions.

Keywords: political parties; student organizations; and Islam.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari latar belakang bahwa partai politik secara umum dan partai Islam secara khusus sedang mengalami persoalan serius yakni bertolak belakangnya antara idealisme peran dan fungsi terhadap realitas kehidupan partai politik sehari-hari yang disaksikan oleh masyarakat. Partai politik mendapat stigma yang negatif misalnya partai dinilai korup, feodal dan tidak memikirkan nasib rakyat kecil. Partai Islam yang menjadi objek kajian penelitian dalam beberapa kali kompetisi pemilihan umum (pemilu) belum mampu menjadi pemenang atau peraih suara mayoritas meskipun memiliki kedekatan secara kultural bahkan ideologis dengan umat Islam di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan hasil penelitian menunjukkan bahwa partai Islam masih diragukan komitmennya menjalankan tanggung jawab dan secara garis besar belum menarik minat atau belum dipercaya oleh sebagian aktivis organisasi mahasiswa Islam, sebagian yang lain masih memberi kesempatan dan kepercayaan dengan harapan partai Islam dapat memperbaiki citra negatif yang melekat pada institusinya.

Kata Kunci: partai politik; organisasi mahasiswa; dan Islam.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peran penting dan strategis yang dimiliki oleh partai politik secara normatif seringkali berbanding terbalik bahkan sangat jauh dibandingkan dengan realitas kehidupan partai politik sehari-hari. Masyarakat menilai bahwa partai politik korup, kumuh, penuh intrik dan kecurangan, bermental feodal, bersikap borjuis serta tidak berpihak pada rakyat kecil. Kesan atau stigma buruk ini sulit dibantah oleh elit dan pengurus partai politik karena hal demikian merupakan tontonan yang disaksikan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia secara langsung ataupun melalui media cetak dan elektronik. Masalah serius yang dialami partai politik tersebut tak mengenal ideologi, warna atau lambang partai, bahkan partai yang berbasis agama sekalipun juga banyak anggotanya yang menjadi terpidana kasus korupsi. Masyarakat Indonesia sudah sama-sama mengetahui bahwa contoh kasus korupsi yang menimpa elit tertinggi partai politik di Indonesia seperti Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaq, Surya Dharma Ali, Setya Novanto, sampai skandal terbaru menjelang pemilu 2019 yang melibatkan Romahurmuziy. Nama-nama yang disebutkan itu adalah jajaran ketua umum partai, jika ditambah kasus yang menimpa wakil ketua umum, sekjend, atau lingkaran elit partai lainnya maka daftar nama tersebut masih sangat panjang dari hampir semua partai politik di Indonesia.

Melihat perolehan suara dalam beberapa kali pemilu terakhir, nampak bahwa partai politik berideologi atau berbasis massa Islam semakin terpinggirkan dan tidak mampu menyaingi perolehan suara partai politik nasionalis. Pada pemilu tahun 2019 yang lalu, suara tertinggi pertama diperoleh PDIP, kedua partai Gerindra, dan ketiga partai Golkar. Sementara partai yang secara resmi berdasarkan Islam yakni PPP justru memperoleh suara yang paling sedikit dan Partai Bulan Bintang sudah tidak mampu meloloskan calegnya duduk dikursi parlemen.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu 2019

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Kursi DPR RI
1	PDI Perjuangan	27.053.961 (19,33%)	128 kursi
2	Partai Gerindra	17.594.839 (12,57%)	75 kursi
3	Partai Golkar	17.229.789 (12,31%)	85 kursi
4	PKB	13.570.097 (9,69%)	58 kursi
5	Partai Nasdem	12.661.798 (9,05%)	59 kursi
6	PKS	11.493.663 (8,21%)	50 kursi
7	Partai Demokrat	10.876.057 (7,77%)	54 kursi
8	PAN	9.572.623	44 kursi

		(6,84%)	
9	PPP	6,323.147 (4,52%)	19 kursi

Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1242295/kpu-tetapkan-hasil-perolehan-kursi-pemilu-2019-ini-daftarnya>

Tabel tersebut menunjukkan partai berbasis Islam belum mampu menguasai mayoritas suara atau menjadi pemenang pemilu, padahal partai-partai Islam memiliki hubungan secara kultural, ideologis serta historis dengan umat Islam Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi berbeda dengan apa yang seharusnya atau idealnya. Pertanyaannya adalah mengapa hal itu terjadi? atau mengapa partai-partai yang memiliki kedekatan ideology dengan mayoritas rakyat Indonesia tidak mendapatkan simpati yang lebih besar? Kemungkinannya adalah karena partai-partai berbasis Islam tersebut tidak mampu membedakan dirinya dengan partai-partai lain yang tidak berasas atau berlandaskan agama, tidak lebih bersih, tidak mampu menjaga integritas dan juga tidak lebih memperjuangkan kepentingan rakyat kecil ditingkat bawah atau akar rumput.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, hal ini tentunya menjadi kajian menarik untuk menganalisis bagaimana eksistensi partai politik Islam menurut perspektif aktivis organisasi mahasiswa Islam di Universitas Baturaja.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Eksistensi

Kata eksistensi diartikan bahwa manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan eksistensi sama dengan keberadaan. Eksistensi terkait dengan keberadaan fisik dan fungsi yang melekat dalam dirinya (Ardani, 2013). Kata eksistensi berasal dari bahasa Latin *Existere*, yaitu *ex* yang berarti keluar dan *sitere* yaitu membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa sesuatu itu ada.

Satu-satunya faktor yang membedakan setiap hal yang ada dari tiada adalah fakta. Menurut Bapak Gerakan Eksistensialis Kierkegaard, menegaskan bahwa yang pertama-tama penting bagi keadaan manusia yakni keadaannya sendiri atau eksistensinya sendiri. Ia menegaskan bahwa eksistensi manusia bukanlah ‘ada’ yang statis, melainkan ‘ada’ yang ‘menjadi’. Dalam arti terjadi perpindahan dari ‘kemungkinan’ ke ‘kenyataan’. Apa yang semula berada sebagai kemungkinan berubah menjadi kenyataan. Gerak ini adalah perpindahan yang bebas, yang terjadi dalam kebebasan dan keluar dari kebebasan. Ini terjadi karena manusia mempunyai kebebasan memilih. Kierkegaard menekankan bahwa eksistensi manusia berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidup. Maka barang siapa tidak berani mengambil keputusan, ia tidak hidup bereksistensi dalam arti sebenarnya.

2. Konsep Partai Politik

Terdapat beberapa pendapat ahli yang secara umum menekankan bahwa partai politik pada aspek mempertahankan dan merebut kekuasaan. Menurut Roger Soltau:

“Partai politik merupakan sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri” (Agustino, 2007:101).

Selain itu Sigmund Neumann menyebutkan bahwa: “Partai politik adalah dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda” (Rahman, 2007:102).

Budiardjo (2003:161) mengemukakan bahwa partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka tentunya memiliki ideologi tersendiri terkait dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Merujuk pada beberapa definisi partai politik di atas, setidaknya dapat dirumuskan bahwa partai politik merupakan kumpulan masyarakat atau kelompok terorganisir yang memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan melakukan persaingan dengan kelompok lain untuk meraih kekuasaan, serta memiliki ideologi dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

3. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Menurut Budiardjo (2003:163) partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik
- b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik
- c. Partai sebagai Sarana *Recruitment* Politik
- d. Partai politik sebagai Sarana Pengatur Konflik

Sedangkan Surbakti (2010:149) berpendapat bahwa fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (*komunis*) maupun diktatorial individu (*fasis*).

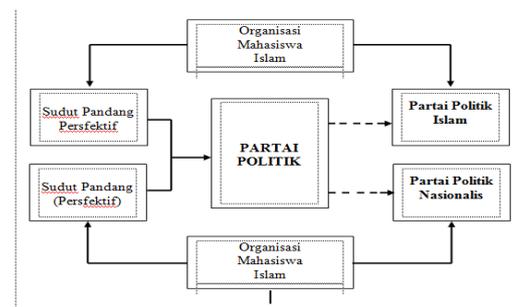
4. Partai Politik Islam

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara

lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat.

Partai politik Islam dapat dipahami dengan beberapa kriteria: *Pertama*, mencantumkan Islam sebagai asas partai. *Kedua*, menggunakan simbol-simbol yang identik atau secara dekat diasosiasikan dengan Islam seperti "Bulan Bintang", "Ka'bah", "kalimat atau tulisan Arab", dan sebagainya. *Ketiga*, memiliki basis sosial utama dari kalangan Islam tertentu. Di samping itu, partai Islam ditandai pula oleh adanya personalia kepemimpinan partai yang didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang Islam yang kuat (*santri*) serta pengambilan keputusan yang cenderung memihak kepada kepentingan unsur Islam (Amir, 2003:20).

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

2. Pembahasan

A. Persepsi tentang Hubungan Agama dan Negara

Agama dan negara adalah dua institusi yang keberadaannya sama-sama penting bagi kehidupan masyarakat meskipun terjadi perbedaan pendapat atau sudut pandang bagaimana pola relasi yang ideal antara keduanya. Para ahli dan tokoh Islam setidaknya mengklasifikasikan pemikiran yang beragam tersebut menjadi tiga kategori, yaitu (1) pandangan yang ingin memformalkan atau mengintegrasikan syariat agama kedalam sistem ketatanegaraan, (2) pandangan yang menghendaki pemisahan agama dan negara secara keseluruhan, dan (3) pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak harus berlandaskan agama namun negara dapat menyerap nilai-nilai agama sebagai sumber moral dan panduan etik.

Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa agama harus menjadi landasan atau dasar bagi penyelenggaraan suatu negara, khususnya bagi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dasar pemikiran kelompok pertama bahwa agama Islam sebagaimana diyakini oleh seluruh penganutnya bersifat sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan dari yang paling kecil sampai hal-hal yang besar, terlebih urusan politik kenegaraan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Ungkapan yang seringkali disampaikan misalnya “orang Islam itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali sudah ada aturannya”.

Dalam konteks negara Indonesia keyakinan kelompok pertama ini mempunyai akar sejarah, sebagaimana kita ketahui bahwa sila pertama Pancasila sebelum diubah (teks asli) berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”, namun karena keberatan kalangan non-Muslim dari wilayah Indonesia Timur maka para tokoh bangsa (*founding fathers*) bermusyawarah untuk mengubah sila pertama tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang kita kenal saat ini. Pandangan kelompok pertama sering disebut tipologi formalistik/organik/integralistik.

Sudut pandang kelompok kedua adalah sebaliknya, yang menganggap bahwa agama dan negara tidak boleh saling mempengaruhi, agama tidak boleh mengatur negara demikian juga negara tidak boleh mengintervensi agama. Keduanya betul-betul harus dipisahkan. Dan agama Islam menurut kelompok yang kedua ini tidak ada perbedaan sama sekali dengan agama-agama yang lainnya. Agama adalah murni urusan pribadi/keluarga dan negara murni urusan duniawi, sehingga pengaturannya diserahkan pada akal budi dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena pandangannya demikian, kelompok kedua disebut sebagai kelompok/tipologi sekuler.

Sedangkan pandangan ketiga dapat dikatakan merupakan sintesis dari dua kutub pemikiran yang bertolak belakang di atas. Kelompok ketiga menganggap agama (Islam) tidak pernah menyebutkan satu kata pun dalam kitab sucinya tentang bentuk negara, namun dalam Islam diajarkan nilai-nilai yang menjadi tujuan dan cita-cita luhur kehidupan misalnya tentang keadilan, kejujuran, persatuan, keamanan, kesejahteraan dan seterusnya. Oleh sebab itu, negara tetap membutuhkan agama sebagai panduan moral atau untuk menjadi sumber nilai etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok ketiga dikategorikan sebagai kelompok/tipologi moderat.

Menurut hasil wawancara dengan aktivis organisasi Islam di Universitas Baturaja, ada sedikit perbedaan pandangan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa penjelasan informan terkait hubungan agama dan negara. Wawancara pertama dilakukan kepada aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bernama lengkap Erlangga Citra Valentino, dia menuturkan pemahaman dan sudut pandangnya sebagai berikut.

“... menurut pandangan saya selaku aktivis organisasi mahasiswa Islam, hubungan negara dan agama tidak dijadikan berdampingan karena penduduk Indonesia ini beranekaragam. Agar negara tidak terpecah belah atau bahkan memicu konflik antar umat beragama ada baiknya hubungan agama dan institusi negara itu dipisahkan. Bukan berarti hubungan agama dan negara itu bertentangan, tidak, tetapi hanya saja dipisahkan antara agama dan institusi negara dan jangan berhubungan seperti itu.”
(Wawancara, tanggal 29 Juni 2019)

Valentino dalam wawancara tersebut menekankan aspek keanekaragaman (*multikulturalisme*) bangsa

Indonesia. Ia khawatir jika negara ini berdasarkan satu agama saja, dapat menyebabkan perpecahan atau bahkan memicu konflik antar umat beragama.

Sementara aktivis organisasi mahasiswa Islam yang lainnya menuturkan hal yang berbeda dari apa yang disampaikan Valentino di atas, misalnya apa yang diungkapkan Ahmad Fahrozi selaku aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dia menuturkan.

“... menurut saya pak ya, hubungan agama dan institusi negara itu sangat erat, dari mulai terbentuknya negara kita sendiri merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran dari para ulama atau tokoh agama dan institusi negara sendiri masih banyak berkiblat pada hukum-hukum agama. Jasa-jasa dari para tokoh agama tidak bisa dilupakan begitu saja.”

(Wawancara, tanggal 29 Juni 2019)

Hal tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh Arifuddin sebagai aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menyatakan bahwa.

“... jadi, sesuai yang diketahui bahwa negara dan agama itu memiliki hubungan yang sangat erat dan bahwa kita di didik di KAMMI agar memandang sebuah agama itu mengatur segala aspek kehidupan dari kita bangun sampai kita tidur. jadi jika ditanya hubungan agama dan negara itu sangat erat sekali, dimana dua komponen tersebut harus berjalan beriringan atau saling melengkapi.”

(Wawancara, tanggal 29 Juni 2019)

Sementara Elka Saputra selaku aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyatakan dengan singkat bahwa.

“... hubungan agama dengan institusi negara kalau menurut saya baik-baik saja karena sudah tercantum di Pancasila.”

(Wawancara, tanggal 1 Juli 2019)

Wawancara berikutnya peneliti lakukan kepada M. Jefri selaku aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Universitas Baturaja. Pandangannya adalah sebagai berikut.

“... menurut saya hubungan agama dan institusi negara sangat penting terbukti agama (khususnya Islam) itu sangat berperan karena agama Islam ini mayoritas dan juga di Indonesia ini sejarah telah mencatat peran kalangan umat Islam bagi negara, selain itu yang mempunyai hak suara dan sebagainya otomatis agama Islam lah yang paling banyak.”

(Wawancara, tanggal 3 Juli 2019)

Berdasarkan uraian dan pemaparan informan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebagian besar menyatakan agama dalam hal ini Islam telah memiliki hubungan dan sejarah yang panjang terhadap perjalanan negara Indonesia, bahkan sebelum republik ini berdiri telah dicatat dalam sejarah bagaimana tokoh-tokoh agama berjuang dan mengorbankan diri untuk negara yang baru ingin didirikan pada masa itu. Hal ini tercermin dari beberapa ungkapan informan yang menggarisbawahi bahwa jangan sampai melupakan begitu saja peran dan jasa tokoh dan kalangan umat beragama khususnya Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia yaitu lebih dari dua ratus

juta jiwa atau lebih dari delapan puluh persen penduduk. Artinya sangat wajar jika ada perhatian khusus pula terhadap sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hanya satu informan yang ingin negara dan agama tidak berhubungan yaitu aktivis HMI, namun empat orang aktivis organisasi mahasiswa Islam lainnya yaitu IMM, PMII, KAMMI dan LDK menyatakan pemikiran yang cenderung moderat bahwa negara memerlukan agama.

B. Kondisi Partai Politik di Indonesia

Partai politik memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di Indonesia. Konstitusi memberikan wewenang kepada institusi politik untuk mengatur dan mengurus negara terutama lembaga legislatif dan eksekutif. Selain hanya partai politik yang berhak mencalonkan Presiden/Wapres serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), peran partai juga termasuk dalam penentuan jabatan-jabatan lembaga tinggi negara lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, jabatan Panglima TNI dan Kapolri tidak bisa dipungkiri adalah orang yang dipercaya oleh Presiden dan disetujui oleh lembaga perwakilan atau DPR, bahkan jabatan dalam lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi sekalipun terdapat peran dari partai politik yaitu anggota MK dimaksud tiga orang berasal dari usulan DPR, tiga orang atas usul Presiden, dan tiga orang lagi adalah usul dari Mahkamah Agung. Artinya enam orang hakim konstitusi tersebut diusulkan oleh lembaga politik. Lembaga peradilan yang dianggap sebagai lembaga independen serta merdeka saja memiliki hubungan dengan lembaga politik, menunjukkan betapa besarnya wewenang dan fungsi yang dimiliki partai politik.

Para tokoh dan pengamat telah banyak mengungkapkan bahwa kewenangan atau fungsi yang sangat besar dimiliki partai politik tersebut masih belum didukung oleh kemampuan dan integritas partai politik itu sendiri. Persoalan saat ini adalah partai politik sebagai wadah aspirasi bukan menjadi solusi bagi nasib rakyat, bahkan seringkali partai politik mempertontonkan pengkhianatan secara kolektif terhadap rasa keadilan rakyat kecil. Berpihak pada rakyat kecil seringkali hanya slogan dan pemanis kata-kata saat musim kampanye, setelah kekuasaan telah dipercayakan maka janji untuk memperjuangkan nasib rakyat tidak pernah diingat kembali, yang terjadi justru perjuangan untuk mengeruk keuntungan diri sendiri serta kelompok masing-masing.

Menurut hasil wawancara dengan informan yang peneliti lakukan, semua menyatakan hal yang hampir sama terkait keadaan partai politik di Indonesia saat ini. Partai politik dalam penilaian aktivis organisasi Islam di Universitas Baturaja secara umum lebih banyak mementingkan diri serta kelompoknya saja, sangat sulit menemukan partai yang memiliki tingkat kejujuran ataupun integritas yang tinggi.

Penjelasan yang diberikan oleh informan dimaksud seperti tergambar dalam hasil wawancara berikut ini. Valentino selaku aktivis HMI menyatakan bahwa partai politik belum ideal karena tidak sesuai dengan nilai-nilai

demokrasi serta partai politik seringkali melanggar kode etik yang dimiliki.

"...menurut pendapat saya memang negara Indonesia adalah negara demokrasi yang adanya partai politik merupakan sebuah keharusan. Jadi menurut saya kondisi partai politik Indonesia saat ini belum mendekati atau menjalankan nilai demokrasi serta sesuai kode etik partai politik. Karena saat ini perpolitikan Indonesia ini banyak sekali kepentingan-kepentingan sepihak, kepentingan politik yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan tujuan ideal adanya partai politik itu sendiri. Jadi bisa dikatakan partai Indonesia ini belum bagus.

(Wawancara, tanggal 29 Juni 2019)

Penjelasan berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Fahrozi, selaku aktivis IMM yang juga menilai bahwa partai politik lebih banyak mengutamakan ambisi atau kepentingannya sendiri dan banyak hal yang harus diperbaiki dari partai politik.

"...menurut berita dan pengetahuan yang saya dapatkan, partai politik di Indonesia saat ini lebih mengedepankan ambisi masing-masing. Dia lebih mementingkan tujuan atau kepentingan dari partai politik itu sendiri, intinya masih banyak sekali permasalahan dari partai politik yang perlu diperbaiki."

(Wawancara, tanggal 20 Juni 2019)

Sudut pandang Saputra selaku aktivis PMII sedikit berbeda dalam melihat realitas atau keadaan partai politik saat ini, seperti dia sampaikan berikut ini.

"... partai saat ini baik-baik saja tidak ada yang tidak baik. Hanya saja kondisinya itu kemungkinan ada salah satu oknum yang memang didalam partai itu yang melakukan korupsi. Terkadang partai itu dijadikan sebagai sumber keuangan atau untuk naik jabatan ke DPR, DPD, dll oleh oknum atau seseorang. Mereka menyalahgunakan sebuah kepercayaan yang telah diberikan tersebut."

(Wawancara, tanggal 1 Juli 2019)

Meskipun awalnya informan ini menyatakan bahwa partai baik-baik saja, namun dia tidak mengingkari bahwa didalam tubuh partai politik banyak penyakit korupsi yang dia istilahkan sebagai oknum. Namun, persoalannya oknum-oknum itu jumlahnya tidak sedikit, sehingga pengaruhnya sampai pada sistem itu sendiri karena seringkali oknum tersebut memiliki posisi bahkan di puncak organisasi, sehingga arah dan tujuan partai sangat dipengaruhi oleh oknum-oknum koruptor.

Arifuddin selaku aktivis KAMMI menyampaikan bahwa partai politik khususnya partai Islam juga tidak memiliki satu pandangan yang sama dalam menjalankan nilai-nilai atau konsep Islam.

"... KAMMI memandang bahwa belum adanya sebuah keserasian antara cara-cara yang digunakan partai politik Islam, jadi dalam artian banyak partai politik Islam yang belum sepakat dengan konsep konsep Islam dan mungkin perlunya sebuah keserasian antar partai politik Islam yang satu dan yang lainnya."

(Wawancara, tanggal 20 Juni 2019)

Hal yang ingin disampaikan oleh Arifuddin tersebut adalah pentingnya kebersatuan partai Islam, sehingga menjadi satu kekuatan yang besar dapat mewarnai

perpolitikan negeri. Bukan terpecah-pecah menjadi kekuatan kecil yang berbeda haluan antar satu partai dengan partai Islam lainnya.

Pandangan dari Jefri selaku aktivis LDK menyoroti tentang Persatuan yang telah tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Bahwa partai politik seharusnya menjadi salah satu institusi untuk meredam konflik yang terjadi ditengah masyarakat, namun menurut penilaiannya partai politik di Indonesia itu kacau dan tidak tertata secara baik.

"... mengenai partai politik menurut saya di Indonesia ini amburadul karena begitu banyak partai politik di Indonesia namun persatuannya itu nol karena kita lihat saat ini di Indonesia. Contohnya waktu pemilu tadi dibagi 2 paslon presiden dan 2 kubu jadinya disana itu saya lihat setelah selesai pemilihan presiden namun masih diungkit-ungkit. Kita lihat dari negara-negara lain contohnya Amerika Serikat dll mereka mengadakan juga pemilu, mereka saling berseteru juga dalam pelaksanaan pemilu namun setelah itu mereka bersatu." (Wawancara, tanggal 3 Juli 2019)

Berdasarkan uraian dan pendapat dari informan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kondisi partai politik di Indonesia memang masih banyak persoalan, sehingga masyarakat menjadi ragu terhadap komitmen dan keseriusan partai politik dalam menjalankan fungsinya yang demikian besar. Partai terjebak dalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan tanpa memikirkan sejatinya untuk apa keberadaan partai politik bagi perbaikan kesejahteraan rakyat dan mengapa konstitusi mengamanatkan tanggungjawab yang besar kepada partai politik. Korupsi yang menghancurkan bangsa dan negara tidak akan pernah mampu jika hanya mengandalkan satu institusi yaitu KPK, karena bagaimanapun KPK memiliki keterbatasan kemampuan dan tenaga menghalau penjahat-penjahat di negara yang sangat luas seperti Indonesia.

Oleh sebab itu, agenda pemberantasan korupsi akan mungkin sukses terlaksana apabila mendapatkan dukungan dan komitmen dari partai politik secara keseluruhan. Partai memiliki keistimewaan untuk dapat membuat aturan perundang-undangan melalui anggotanya jika berkomitmen kuat serta serius dalam melawan koruptor. Namun, jika sikap sebaliknya yang ditunjukkan oleh partai politik maka kehancuran bangsa akan semakin terbuka lebar.

Partai saat ini juga dinilai sangat lemah dalam penghayatan kepada ideologi yang menjadi pemandu langkah atau gerak organisasi, partai agama maupun partai nasionalis sama-sama sangat pragmatis, tidak serius menghayati nilai agama ataupun nilai Pancasila terlebih menjalankan nilai-nilai dimaksud dalam langkah dan kerja konkret dalam pemerintahan.

C. Urgensi dan Kepercayaan terhadap Parpol Islam

Partai politik yang memilih untuk menjadikan Islam sebagai landasan atau dasar partai pastilah sejak awal menyadari konsekuensi menjadi partai agama. Nilai dan ajaran luhur agama seharusnya menjadi inspirasi bagi partai dalam melakukan suatu tindakan atau

perbuatan. Bagi masyarakat terutama umat Islam wadah aspirasi secara khusus yang mewakili kelompok umat Islam memang cukup penting seperti diungkapkan oleh aktivis organisasi mahasiswa Islam dibawah ini.

"... bagi saya umat islam itu cukup penting untuk memiliki wadah aspirasinya sendiri karena partai politik memang memiliki ideologi yang berbeda-beda antar partai politik, jadi antar partai A dan B tidak memiliki pandangan yang sama oleh karena itu menurut saya penting untuk menyalurkan aspirasinya bahkan harus partai politik sendiri agar aspirasi-aspirasinya kaum umat Islam itu bisa disalurkan dengan kepentingan umat islam."

(Wawancara, tanggal 29 Juni 2019)

Hal itu disampaikan oleh Valentino sebagai aktivis HMI, bahwa umat Islam memerlukan saluran untuk menjadi wadah bagi kepentingan Islam.

"... menurut saya sangat penting umat Islam memiliki tempat atau wadah untuk menyalurkan aspirasinya sendiri. Apalagi zaman sekarang partai politik itu mengutamakan kepentingan bagi masing-masing partai sendiri, jadi sangat penting untuk mewakili aspirasi kelompok umat Islam."

(Wawancara, tanggal 20 Juni 2019)

Pendapat yang dikemukakan oleh Fahrozi sebagai aktivis IMM diatas karena melihat realitas partai mementingkan diri dan kelompoknya sendiri-sendiri sehingga masyarakat akhirnya berpikir bahwa kelompoknya juga harus memiliki partai sendiri.

"...penting bagi kami memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya tetapi menyampaikan aspirasi harus ada batasan dan tidak melampaui batasan."

(Wawancara, tanggal 1 Juli 2019)

Menurut pendapat Saputra diatas sebagai aktivis PMII, wadah aspirasi merupakan hal yang penting, namun cara dan waktu menyampaikan aspirasi harus sesuai batasan.

"... yang jelas Parpol Islam hanya butuh satu fiqroh terlepas banyaknya partai politik yang ada yang berazaskan Islam itu tidak berpengaruh, yang jelas satu fiqrah membuat sebuah koalisi seperti itu karena kita lihat saat ini justru partai politik yang satu dan yang lainnya beda koalisi atau kesepakatan."

(Wawancara, tanggal 20 Juni 2019)

Selanjutnya adalah pembahasan tentang tingkat kepercayaan aktivis mahasiswa Islam terhadap partai politik Islam. Seharusnya dua elemen yang berbeda lahan garapan ini dapat memiliki hubungan yang dekat serta saling mendukung, karena keduanya mempunyai kesamaan yaitu ideologi Islam. Cita-cita besar serta tujuan antara partai politik Islam dan organisasi mahasiswa Islam seharusnya memiliki kesamaan yaitu cita-cita agama itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sejahtera.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan penelitian, didapatkan hasil yang cukup berbeda dengan idealisme diatas. Beberapa informan bahkan tidak begitu percaya kepada partai

Islam dan lebih memilih partai yang tidak berdasarkan agama (Islam). Berikut hasil wawancara dimaksud.

"... jadi, menurut saya partai politik Islam yang ada di Indonesia saat ini belum cukup ideal, mengapa? Karena banyak yang mengesampingkan kepentingan umat Islam dan juga banyak partai-partai yang terlibat korupsi. Partai Islam selain itu juga banyak yang mengabaikan ijtima' ulama atau tujuan dari umat Islam itu sendiri." (Wawancara, tanggal 29 Juni 2019)

Selanjutnya pandangan yang berbeda disampaikan oleh informan kedua, yang menuturkan pendapatnya bahwa hampir semua partai memiliki permasalahan masing-masing, seperti dibawah ini.

"... kita tidak menutup mata bahwa partai politik secara umum memiliki banyak permasalahan intra atau dari dalam institusinya, namun sebagai umat Islam kita tetap dapat percaya dan menitipkan suara kepada partai Islam karena minimal antara umat Islam dan partai Islam memiliki kedekatan ideologi, partai diluar Islam sulit untuk mewakili atau menyalurkan suara-suara dari kalangan umat Islam, mereka juga sibuk dengan kepentingan kelompoknya masing-masing. Kita juga berharap ada kesadaran dari partai politik terutama yang berbasis Islam memperbaiki diri." (Wawancara, tanggal 20 Juni 2019)

Aktivis PMII memiliki argumentasi dan alasan sendiri terkait kepercayaan pada partai Islam. Menurutnya yang lebih penting adalah partai mana yang dekat dengan ideologi NU sebagai organisasi induk bagi PMII, maka partai itulah yang diyakini dapat mewakili dan dapat dipercayai, seperti disampaikan berikut ini.

"...setiap organisasi Islam itu memiliki partai tersendiri, kalau PMII tidak dekat dengan semua partai hanya partai-partai yang berbasis islam NU saja. Kalau Saya memilih partai yang berbasis Islam NU. Karena ibaratnya kita mempunyai ulama dengan PMII itu independen cuman kalau PMII ke islam NU." (Wawancara, tanggal 1 Juli 2019)

Aktivis LDK lebih memilih karena faktor orangnya bukan karena partainya berlandaskan agama Islam atau tidak.

"... kalau dilihat dari partainya itu saya belum percaya, tetapi saya memilih orangnya. Karena yang bakal menjalankannya itu orangnya mungkin sedikit banyak ada campur tangan dari partai. Kita lihat dari orangnya asalkan orangnya punya karakter di dirinya meskipun itu bukan partai yang Islam seperti partai PKS, dll kalau mereka tidak menjalankan Islam itukan percuma. Kalau Saya kemarin memilih ke Prabowo ke partai Gerindra dan saya memilih karena orangnya." (Wawancara, tanggal 3 Juli 2019)

Ungkapan-ungkapan sederhana namun sesuai realita yang disampaikan oleh informan diatas menunjukkan kepada peneliti bahwa sekalipun mereka aktivis organisasi mahasiswa Islam namun tidak memiliki ketertarikan ataupun kepercayaan pada institusi partai politik Islam. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa kenyataan memalukan yang dilakukan oleh anggota ataupun elit partai Islam. Mengaku anggota partai Islam, namun tidak menjalankan nilai dan ajaran Islam adalah

suatu hal yang tidak patut dalam pandangan aktivis mahasiswa Islam.

Partai Islam secara garis besar dapat disimpulkan belum menarik minat dan belum dipercaya oleh sebagian aktivis organisasi mahasiswa Islam, sebagian yang lain mengakui bahwa partai Islam juga bermasalah seperti partai pada umumnya, namun lebih karena kedekatan ideologi organisasi maka mereka tetap mempercayai dengan harapan partai Islam dapat berbenah diri.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi tentang hubungan agama dan Negara. Menurut aktivis organisasi mahasiswa Islam di Universitas Baturaja agama dan negara di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Hanya satu informan yang ingin negara dan agama di Indoensia tidak memiliki hubungan yaitu aktivis HMI, namun empat orang aktivis organisasi mahasiswa Islam lainnya yaitu IMM, PMII, KAMMI dan LDK menyatakan pemikiran yang cenderung moderat bahwa negara memerlukan agama".
2. Kondisi partai politik di Indonesia banyak persoalan, antara lain masalah korupsi, sikap pragmatis dan menghalalkan segala cara sehingga aktivis organisasi mahasiswa Islam ragu pada komitmen dan keseriusan partai politik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
3. Partai politik Islam secara garis besar belum menarik minat dan belum dipercaya oleh sebagian aktivis organisasi mahasiswa Islam, sebagian yang lain masih memberi kesempatan dan kepercayaan dengan harapan partai Islam dapat memperbaiki citra negatif yang melekat pada institusinya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo.2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta. Grahan Ilmu.
- Amir, Zainal Abidin, 2003, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta. LP3ES.
- Ardani, Irfan. *Eksistensi Dukun dalam Era Dokter Spesialis*. Lakon: Jurnal Kajian Sastra dan Budaya Vol. 1 No. 2
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Remaja Rosda Karya.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo

Website/Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1242295/kpu-tetapkan-hasil-perolehan-kursi-pemilu-2019-ini-daftarnya>